

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau. Guna melaksanakan amanat tersebut, maka pemerintah telah menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku secara nasional sejak tahun 2014.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu bentuk perlindungan melalui mekanisme asuransi sosial untuk seluruh penduduk Indonesia yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah bagi peserta yang tidak mampu, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan. Dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, dijelaskan bahwa seluruh jenis pelayanan kesehatan yang wajib ditanggung dalam program JKN antara lain adalah pelayanan obat dan bahan habis pakai.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pasal 23 ayat 1.

Untuk menjamin obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan merupakan obat yang aman, berkhasiat, bermutu serta dengan harga yang terjangkau, maka Menteri Kesehatan membentuk Komite Nasional yang bertugas untuk membuat acuan penggunaan obat yang tertuang dalam Formularium Nasional . Formularium Nasional merupakan acuan berisi daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain digunakan sebagai acuan bagi fasilitas kesehatan, Formularium Nasional juga digunakan sebagai perangkat kendali mutu dan biaya (Kemenkes RI,

2013). Tujuan utama pengaturan obat dalam formularium nasional adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan. Formularium Nasional dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan karena dalam proses penyusunannya dilakukan melalui tahap penyeleksian dan pengujian ketat hingga pada akhirnya hanya obat yang paling berkhasiat dengan harga terjangkau yang terpilih. Sementara kendali biaya dilakukan dengan penetapan harga obat di e-katalog melalui proses lelang dan negosiasi.

Dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, disebutkan bahwa penggunaan obat harus disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Apabila obat yang dibutuhkan belum tercantum dan Formularium Nasional, maka dapat digantikan dengan obat lain berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi, dan disetujui oleh Komite Medik/Direktur Rumah Sakit yang biayanya termasuk dalam INA-CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada pasien.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh instalasi farmasi RS PMI Bogor pada tahun 2016 dan 2017 penggunaan obat sesuai Formularium Nasional di rumah sakit masih belum optimal, dimana masih ditemukan adanya resep-resep dokter yang belum sesuai Formularium Nasional baik secara restriksi obat dan peresepan maksimalnya, serta masih belum tersedianya seluruh obat yang masuk dalam Formularium Nasional di Instalasi Farmasi RS PMI Bogor.

Sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kesesuaian peresepan dengan formularium nasional yang meliputi kesesuaian restriksi obat dan peresepan maksimalnya pada pasien JKN rawat jalan di Instalasi Farmasi RS PMI Bogor tahun 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Jumlah pasien JKN di RS PMI Bogor setiap tahun mengalami peningkatan, hal tersebut juga diiringi dengan meningkatnya kebutuhan obat-obatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS wajib mengacu

pada Formularium Nasional dalam memberikan obat kepada pasien JKN. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan adanya resep-resep dokter yang belum sesuai Formularium Nasional baik secara restriksi obat dan peresepan maksimalnya. Juga belum tersedianya seluruh obat yang masuk dalam Formularium Nasional di Instalasi Farmasi RS PMI Bogor.

Resep-resep dokter yang tidak sesuai Formularium Nasional menyebabkan antara lain pemberian obat kepada pasien tidak optimal, tidak sesuai dengan terapi yang dikehendaki dokter, akibat lainnya pasien harus membayar lebih sedangkan menurut aturan pasien tidak boleh membayar. Kondisi ini merupakan suatu dilema di satu sisi pemenuhan kebutuhan obat sesuai resep dokter di sisi lain terdapat aturan pasien tidak boleh membayar.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Setelah mengetahui permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah:

- a. Bagaimanakah gambaran peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan JKN dengan resep yang diterima oleh instalasi farmasi RS PMI Bogor?
- b. Berapa persen jumlah resep dan obat yang masuk dan sesuai Formularium Nasional?
- c. Berapa persen jumlah kesesuaian resep dan obat dengan restriksinya?
- d. Berapa persen jumlah kesesuaian resep dan obat dengan peresepan maksimalnya?
- e. Berapa persen penulisan resep dan obat generik?
- f. Berapa persen resep yang poli farmasi dan tidak poli farmasi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui gambaran peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan JKN dengan resep yang diterima oleh instalasi farmasi RS PMI Bogor.
- b. Mengetahui persentase jumlah resep dan obat yang masuk dan sesuai Formularium Nasional.
- c. Mengetahui persentase jumlah kesesuaian resep dan obat dengan restriksinya.

- d. Mengetahui persentase jumlah kesesuaian resep dan obat dengan persepan maksimalnya.
- e. Mengetahui persentase penulisan resep dan obat generik.
- f. Mengetahui persentase resep yang poli farmasi dan tidak poli farmasi.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Bagi Rumah Sakit

Hasil Penelitian dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk membantu meningkatkan ketersediaan obat-obatan sesuai Formularium Nasional dan informasi bagi para dokter untuk meresepkan obat-obatan sesuai Formularium Nasional.

b. Bagi Akademik

Hasil Penelitian ini dapat menambah koleksi literatur terutama mengenai penggunaan obat sesuai Formularium Nasional.

1.6. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kesesuaian penulisan resep dengan Formularium Nasional mencakup restriksi obat dan persepan maksimalnya pada pasien JKN rawat jalan di Instalasi Farmasi RS PMI Bogor.